



**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTER VILLAGE
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
DALAM STATUS AKTIF NORMAL (PRA BENCANA)
DI KABUPATEN MAGELANG
(Studi Kasus *Sister Village* antara Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung)**

JURNAL

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata I
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

WILLYBRODUS GABRIEL KRISTIFOLUS

14010112130126

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTER VILLAGE
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA ERUPSI MERAPI DALAM
STATUS AKTIF NORMAL (PRA BENCANA) DI KABUPATEN MAGELANG
(Studi Kasus *Sister Village* antara Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung)**

ABSTRAK

Model manajemen bencana dewasa ini berfokus pada upaya pengurangan resiko bencana (mitigasi bencana) bukan sekedar pada usaha tanggap darurat. Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang sangat rawan bencana, terutama bencana erupsi Merapi. Perlu sebuah penanganan khusus karena Merapi selalu aktif dan akan memenuhi janjinya. Berkaca pada erupsi Merapi pada tahun 2010 yang sangat kacau, dimana pada waktu para pengungsi tidak tahu harus mengungsi kemana. Sehingga yang mereka lakukan adalah lari sejauh mungkin dari zona rawan bencana. Beberapa bahkan sampai lari mengungsi di luar kota hingga ke Sleman dan Semarang. Keadaan pada waktu sangat tidak terorganisir, warga Desa Ngargomulyo merasa tidak ada yang mengayomi sedangkan dari pemerintah Desa Ngargomulyo tidak tahu kemana saja warganya mengungsi. Bahkan beberapa posko pengungsian melebihi kapasitas penampungan karena jumlah pengungsi yang berdatangan diluar perkiraan yang berimbas pula pada ketidakmampuan relawan menyediakan fasilitas dan logistik. Belajar dari kekacauan tersebut maka dibentuk model penanganan bencana dengan model *sister village* yaitu satu desa rawan bencana akan diarahkan mengungsi pada satu atau beberapa desa yang menjadi penyangga mereka. Dalam model ini Desa Ngargomulyo menjalin *sister village* dengan Desa Tamanagung. Sehingga pada waktu simulasi penanganan bencana erupsi Merapi, warga Desa Ngargomulyo memiliki arah yang pasti dalam mengungsi. Pengungsian lebih terorganisir, bahkan penyediaan fasilitas serta logistik dapat disiapkan secara akurat melalui sistem pendataan kedua desa. Warga akan merasa aman dan nyaman karena mereka bersama-sama mengungsi pada tempat yang jelas sudah disiapkan bagi mereka. Bahkan aktivitas pemerintahan Desa Ngargomulyo dapat tetap aktif di Desa Tamanagung. Sehingga sistem *sister village* merupakan model penanganan bencana yang tepat dilakukan di Kabupaten Magelang.

Kata Kunci : *Sister village*, manajemen bencana, erupsi Merapi, Kabupaten Magelang

**THE IMPLEMENTATION ANALYSIS OF SISTER VILLAGE AS A EFFORT ON
DISASTER MANAGEMENT FOR MERAPI ERUPTION AT PRE DISASTER
SITUATION IN KABUPATEN MAGELANG
(Case Study Sister Village of Ngargomulyo and Tamanagung)**

ABSTRACT

Model of disaster management today has focus on mitigation in disaster, not only just emergency response. Kabupaten Magelang is a region with high risk of disaster, especially from Merapi eruption. This mean need a special handling becuase Merapi usually active and will fulfill it promise. Looking for the eruption in 2010 that so disorder, when the refugee didn't know where did they going. So they do are running far away from the danger zone. The refugee are evacuate go out of the city till Sleman and Semarang. In that situation is unorganized, Ngargomulyo villager feel there is no respect for them and local village goverment of Ngargomulyo didn't know where the villager evacuate them self. Even some house of evacuee are full because the refugee are coming more than the approximating that current to the not able of the volunteer that suply the facilities and logistics. Learn from that confusion so they make the disaster handling model by *sister village* model that one sensitive village will evacuated to one or several village that be the support for them. In this model Ngargomulyo village make a sister village cooperation with Tamanagung village. Until the Merapi eruption disaster handling, the Ngargomulyo villager have a certain way to evacuate. The evacuating is more organized, even the facilities and the logistics that can prepared more accurate through the data collection system from the both villages. The villager will feel safe because they evacuate together to a certain place that have been prepared by the goverment. In the result sister village is the disaster handling model that can use in Magelang.

Key Word : sister village, disaster management, Merapi eruption, Magelang.

I. Pendahuluan

Kabupaten Magelang adalah wilayah yang berada pada zona rawan bencana. Letaknya yang berbentuk seperti cekungan dengan dikelilingi beberapa gunung termasuk Merapi adalah alasan utama mengapa wilayah tersebut sangat rawan bencana.

Aktivitas vulkanologi Merapi yang tidak pernah berhenti membuat warga Kabupaten Magelang dapat terancam keselamatannya kapan saja. Sejalan dengan filosofi kebencanaan yaitu *living harmony with Merapi* pemerintah Kabupaten Magelang harus mempersiapkan suatu sistem yang mampu memberikan penanganan pengurangan resiko erupsi Merapi.

Perlu diketahui bahwa dampak merugikan dari erupsi Merapi adalah berasal dari *wedhus gembel* atau awan panas yang keluar dari kawah Merapi.

Tabel 1.1
Gambaran korban jiwa bencana gunung Merapi

Tahun Letusan Merapi	Awan Panas (jiwa)	Lahar (jiwa)
1902-1904	16	
1920		35
1930-1931	1369	
1954	64	
1961	6	
1969	1	3
1974		9
1976		29
1994	65	
2006	2	
2010	386	2
JUMLAH	1909	78

Sumber: disampaikan pada kuliah umum di BPBD Kabupaten Magelang¹

Dari data diatas menggambarkan bahwa korban terbesar dari keseluruhan jumlah korban jiwa yaitu hampir 95% diakibatkan oleh bencana awan panas. Dan berkaca pula pada bencana tahun

¹ Materi Sister Village, disampaikan oleh BPBD Kabupaten Magelang pada kuliah umum mata kuliah Manajemen Bencana Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, 7 Mei 2015.

2010 yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa terbanyak dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Magelang berusaha memperbaiki manajemen bencana yang mereka lakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang.

Kemudian bencana erupsi Merapi pada tahun 2010 juga menimbulkan kekacauan yang dirasakan berbagai pihak. Kekacauan utama adalah proses evakuasi pengungsi yang tidak terorganisir. Warga pengungsi tidak tahu harus mengungsi kemana sehingga yang mereka lakukan hanya lari sejauh mungkin dari wilayah rawan bencana. Warga satu desa dapat berpencar mengungsi ke beberapa desa bahkan hingga sampai ke luar kota yaitu wilayah Sleman dan Semarang.

Warga Desa Ngargomulyo termasuk yang ikut dalam hiruk pikuk kekacauan penanganan bencana tersebut. Sebagian besar dari mereka hanya berusaha lari sejauh mungkin dengan menyelamatkan diri mereka sendiri dan harta benda mereka. Alhasil tempat pengungsian mereka menyebar ke beberapa titik.

Setiap hari kepala Desa Ngargomulo yaitu Pak Yatin harus terus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya untuk mencari dan mengecek keadaan warganya. Tentunya hal tersebut sangat menguras energi disamping dia juga harus menjalankan pemerintahan untuk memberikan akses pelayanan publik. Disamping itu beberapa warga Desa Ngargomulyo yang tidak terdeteksi keberadannya oleh Pemerintah Desa Ngargomulyo merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Kemudian yang terjadi adalah *overload* pada posko penampungan pengungsi. Hal tersebut dikarenakan kedatangan pengungsi melebihi perkiraan akibat adanya ketidakpastian jumlah dan asal desa pengungsi dan tidak terorganisirnya evakuasi pengungsi. Dan berimbas pula pada tidak terpenuhinya logistik serta kebutuhan fasilitas pengungsian lainnya seperti MCK dan fasilitas kesehatan penunjang lainnya.

Belajar dari kejadian erupsi Merapi tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Magelang harus menerapkan sebuah sistem penanganan bencana yang mampu mengurangi dampak resiko bencana. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Magelang yang menjadi aktor birokrasi yang menangani kebencanaan merumuskan sebuah model baru penanganan bencana erupsi Merapi yaitu dengan bentuk kerjasama *sister village*.

II. Landasan Teori

A. Teori Kebijakan Publik

Definisi yang umum mengenai kebijakan disampaikan oleh Thomas Dye, yaitu apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang menjadi sikap atau tindakan pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan. Kemudian Edi Suharto (2011:13) juga memberikan gambaran mengenai definisi kebijakan yang tidak hanya bersentuhan dengan pemerintah atau government melainkan juga melibatkan keseluruhan tata kelola pemerintahan. Kebijakan dapat secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya dan kepentingan. Selain itu kebijakan biasanya bersentuhan dengan bidang-bidang yang khas seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan kesejahteraan.

Kebijakan publik sendiri merupakan instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Walaupun kebijakan merupakan produk politik dari pemerintah dikarenakan pasti melewati proses politik didalamnya, kebijakan publik tetaplah secara legal digunakan untuk mencapai kebutuhan atau tujuan publik. Kebijakan publik sebagai alat mencapai tujuan publik tersebut merupakan bentuk kebijakan publik dalam dimensi tujuan.

Dimensi lainnya dalam kebijakan publik adalah dimensi legal dan dimensi hipotesis. Dimensi legal dalam hal ini adalah sebuah kebijakan publik dibuat dan dilakukan oleh pemerintah yang memiliki legitimasi sah. Apabila sebuah kebijakan publik resmi dibuat maka setelah itu jajaran birokrasi dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kemudian dimensi hipotesis berkaitan dengan kajian atau dasar teori yang digunakan untuk analisis dalam pembuatan sebuah kebijakan. Kebijakan bukan sebuah laboratorium uji coba bagi pemerintah, melainkan didasarkan pada asumsi perilaku yang kemudian dapat mengukur dampak apabila kebijakan tersebut dilaksanakan.

B. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan sebuah kebijakan dimana kebijakan tersebut mulai untuk diterapkan atau dilaksanakan. Melalui implementasi sebuah kebijakan dapat berdampak untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Definisi kebijakan menurut Ripley dan Franklin adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Kebijakan yang telah disusun dengan dasar undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah merupakan payung hukum bagi para birokrat untuk kemudian dilaksanakan. Para birokrat disini menjadi aktor utama dalam implementasi sebuah kebijakan.

Kemudian Van Meter dan Van Horn juga memberikan makna implemtasi yaitu lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan. Terdapat pula lima variabel yang memengaruhi implementasi:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, yaitu lebih kepada terukurnya standar dan sasaran. Bila implemtasi tersebut terukur maka memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Sedangkan bila tidak terukur atau bahkan kabur maka dapat menimbulkan masalah bahkan konflik sektoral para pelaksana atau implementator kebijakan.
- b. Dukungan sumberdaya mutlak diperlukan untuk keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Baik sumber daya manusia maupun nonmanusia seperti anggaran dan infrastruktur sangatlah berpengaruh.

- c. Hubungan antar organisasi yang tergabung dalam sebuah tim yang mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sebab hubungan dalam artian koordinasi sangat dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih tugas masing-masing atau bahkan konflik yang berasal dari ego sektoral.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Maksudnya disini adalah model struktur birokrasi yang akan memengaruhi hubungan didalam tubuh birokrasi tersebut. Dimana birokrasi merupakan aktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi dimana variabel tersebut mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan. Termasuk didalamnya adalah dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan, kemudian karakteristik dari partisipan, opini publik di lingkungan implementasi tersebut dan sikap elite politik.
- f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yaitu, pertama adalah respons birokrasi (implementor) terhadap kebijakan; kedua pemahamannya mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan; dan ketiga adalah disposisi implementor yaitu preferensi nilai oleh implementor.

C. Teori Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan bekerjanya fungsi-fungsi dalam manajemen secara umum yang diimplementasikan dalam empat kuadran yaitu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan dan dilakukan secara terus-menerus. Manajemen bencana mencakup multi setor dan multi disiplin. Dikatakan multi sektor karena kegiatan kebencanaan dilakukan oleh banyak sektor misal BNPB, SAR, Kementerian PU, Kemensos, TNI, POLRI, dan sebagainya. Namun untuk mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan hanya dilakukan oleh satu lembaga saja yaitu BNPB untuk skala nasional dan

BPBD untuk skala daerah. Untuk pengertian multi disiplin disini adalah dalam hal pendekatan, manajemen bencana memiliki pendekatan struktural-kelembagaan, religius, klaster.²

Dalam model manajemen kebencanaan telah terjadi pergeseran paradigma. Paradigma lama yaitu lebih menekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan tanggap darurat. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila terjadi bencana, maka manajemen bencana pada waktu itu memusatkan energi untuk menolong para korban bencana dan menyediakan logistik bagi mereka.

Seiring berjalannya waktu konsep paradigma manajemen bencana telah bergeser dari *emergency response* yang tadi menuju *disaster risk management* atau manajemen resiko kebencanaan yang lebih menekankan pada mitigasi kebencanaan. Dalam konsep ini fokus manajemen bencana adalah bagaimana caranya mengurangi dampak dan resiko dari bencana yang terjadi. *Emergency Response* tetap bagian penting dalam manajemen bencana, namun mitigasi kebencanaan mendapat porsi utama dalam setiap program kebencanaan.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa kualitatif dan dengan menggunakan data-data deskriptif. Situs penelitian yang diambil dari tiga tempat, yaitu BPBD Kabupaten Magelang, Kantor Desa Tamanagung dan Kantor Desa Ngargomulyo. Dari situs penelitian tersebut penulis memiliki tiga subyek penelitian sebagai narasumber, yang pertama adalah Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, kemudian Kepala Desa Ngargomulyo dan Kepala Desa Tamanagung.

Data yang diperoleh melalui subyek penelitian berupa informasi dari wawancara dengan diperkuat data-data sekunder seperti penelitian mengenai *sister village* sebelumnya, buku referensi terkait dan dokumen penunjang seperti hasil rapat maupun peraturan desa.

² Ir. Dodi Ruswandi, MSCE, *Pendekatan Klaster Dalam Tanggap Darurat Bencana di Indonesia*, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Jakarta Pusat.

Setelah data terkumpul maka yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasikannya. Data-data tersebut direduksi agar masuk pada kelompok-kelompok data dengan kesamaan tertentu. Baru setelah itu ada sintetisasi atau data-data tersebut dikaitkan.

IV. Pembahasan

A. Pembentukan *Sister Village* antara Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung

Ide *sister village* merupakan buah perenungan dari Kepala Desa Ngargomulyo yaitu Bapak Yatin terhadap kekacauan yang timbul pada erupsi dan pasca erupsi tahun Merapi tahun 2010. Kekacauan utama yang muncul adalah tempat posko pengungsian yang tidak jelas. Dimana pada waktu itu warga hanya dilatih untuk lari sejauh mungkin dari zona rawan bencana menuju zona aman dari bencana. Maka yang terjadi adalah warga dari desa Ngargomulyo pergi mengungsi di beberapa daerah atau posko pengungsian. Mereka hanya tahu harus mengungsi di posko pengungsian tetapi tidak tahu harus memilih posko pengungsian yang mana. Menyebarnya warga ke beberapa pengungsian mengakibatkan kepala Desa Ngargomulyo kesusahan mendata dan menjangkau keadaan serta kebutuhan warganya. Kegiatan keseharian hanya keliling dari desa yang satu menuju desa yang lain untuk melihat apakah ada warga desanya yang mengungsi disitu. Dari sisi warga yang mengungsi mereka merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah desa Ngargomulyo, disinilah menambah daftar panjang konflik yang terjadi.

Selain itu muncul masalah lain dari posko yang ditempati yaitu membludaknya pengungsi akibat jauh dari perkiraan. Membludaknya pengungsi membawa dampak dimana sarana pengungsian menjadi tidak cukup dan tidak nyaman. Untuk logistik juga tidak bisa terpenuhi akibat jumlah pengungsi yang lebih dari perkiraan.

Dari kedua masalah besar itulah konsep *sister village* disusun menjadi sebuah kebijakan manajemen bencana yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi erupsi Merapi. Untuk melaksanakan program *sister village* semua desa di Kabupaten Magelang dibebaskan untuk

saling ‘melamar’ antara desa yang terkena dampak dengan desa penyangga. Disinilah Desa Ngargomulyo, dimana ide *sister village* muncul, dijadikan sebagai *pilot project* dari model *sister village*.

Pilihan *sister village* Desa Ngargomulyo dijatuhkan kepada Desa Tamanagung. Memilih Desa Tamanagung atas beberapa pertimbangan, yaitu pertama memiliki akses yang mudah ditempuh karena terletak pada satu jalur bila ingin ke arah kota. Letak strategis yang dimiliki oleh Desa Tamanagung menjadikan desa ini memiliki akses yang sangat mudah, yaitu terletak persis ditengah jalur menuju jantung pemerintahan Kabupaten Magelang dan juga sebagai jalur provinsi yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta. Kemudian Desa Tamanagung yang terletak di wilayah kota, memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung para pengungsi. Fasilitas ini berupa kemampuan gedung atau bangunan sebagai posko. Kemudian adalah sanitasi yang dapat disediakan. Sekolah-sekolah yang mampu menampung siswa dari Ngargomulyo dan fasilitas IT yang dimiliki oleh pemerintah desa. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Desa Tamanagung memiliki pasar hewan. Tentunya hal ini adalah nilai tambah desa ini untuk menampung warga Ngargomulyo yang jumlah ternaknya lebih banyak ketimbang jumlah penduduk. Hewan ternak milik warga Desa Ngargomulyo dapat dititipkan di pasar hewan sekaligus dijual pada hari-hari tertentu ketika pasar dibuka.

Setelah melalui pemetaan dan perhitungan mengenai kemampuan desa Tamanagung dalam menerima pengungsi maka tahap selanjutnya adalah yang disebut ‘melamar’. Makna ‘melamar’ disini adalah memulai komunikasi untuk kerja sama *sister village*. Bukanlah hal yang mudah untuk menjadi desa penyangga untuk para pengungsi. Desa penyangga harus benar-benar siap mengurus warga desa lain yang menderita dan kesusahan akibat erupsi Merapi. Namun akhirnya melalui negosiasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngargomulyo dengan Kepala Desa Tamanagung membuahkan hasil yang diharapkan. Dibuatlah MOU

kerjasama *sister village* yang ditandatangani oleh kepala desa dari dua behak pilak diatas materai 6000. Keberhasilan awal *sister village* Ngargomulyo dengan Tamanagung membuat implementasi kebijakan ini semakin mantap untuk segera dilaksanakan.

B. Teknis dan Prosedur Pelaksanaan *Sister Village* antara Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung Dalam Keadaan Pra Bencana.

Melalui MOU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kerja sama *sister village* tersebut sudah resmi dilaksanakan. Draft MOU tersebut kemudian dibawa oleh masing-masing pemerintah desa untuk kemudian disusun menjadi peraturan desa.

Setelah ditetapkan MOU maka pihak relawan kebencanaan beserta pemerintah desa masing-masing desa melakukan pendataan dan pemetaan. Pendataan terkait demografi secara mendetail dari Desa Ngargomulyo. Seperti jumlah anak sekolah, lansia, pria dewasa, kelompok rentan, ternak yang dimiliki, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Dari hasil pendataan tersebut maka dapat dipetakan bagaimana nantinya kapasitas dari posko penampungan yang dimiliki oleh Desa Tamanagung.

Teknis pelaksanaan *sister village* melalui simulasi yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali terbagi menjadi tiga tahap, tahap pertama adalah persiapan dan evakuasi. Dalam tahap pertama ini terdapat dua bentuk penanganan. Penanganan terencana dan tidak terencana. Penanganan terencana dilakukan berdasar pada aktivitas bertahap dari erupsi Merapi. Ketika status Merapi mencapai waspada maka yang dilakukan adalah segera menjalin komunikasi dengan aparat Desa Tamanagung untuk mempersiapkan posko pengungsian. Kemudian pihak Desa Ngargomulyo juga harus segera mengumpulkan para relawan untuk membantu warga dalam persiapan evakuasi termasuk pengemasan barang.

Apabila status menjadi siaga, maka yang dilakukan adalah memulai evakuasi dari warga rentan bencana baru setelah itu para pria dewasa, dan terakhir ternak. Maka ketika status mencapai waspada seluruh warga sudah tinggal di posko pengungsian.

Bentuk penanganan tidak terencana adalah penanganan ketika status Merapi langsung menuju siaga atau bahkan awas. Maka dalam penanganan ini yang dilakukan adalah evakuasi secepat mungkin. Prioritas penanganan model ini tetap pada keselamatan warga, sedangkan untuk barang berharga dan ternak menjadi nomor dua.

Tahap selanjutnya adalah pemusatan pengungsi di Balai Desa Tamanagung. Ketika warga pengungsi dipusatkan maka yang dilakukan adalah serah terima kelompok-kelompok warga pengungsi pada para kepala dusun yang akan menampung mereka di wilayah-wilayah dusun Desa Tamanagung.

Hingga tahap terakhir adalah pembauran warga pengungsi dengan warga penyangga. Dalam tahap ini warga pengungsi dapat melakukan aktivitas bersama-sama dengan warga penyangga. Selain itu warga pengungsi yang berprofesi sebagai pedagang bisa melanjutkan pekerjaan mereka dan bagi yang kehilangan lapangan pekerjaan disediakan aktivitas pelatihan dari pihak desa penyangga.

C. Keuntungan dan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan *Sister Village* antara Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung

Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan *sister village* kedua desa adalah pertama warga pengungsi tidak kebingungan harus mengungsi kemana, dikarenakan arah tujuan mengungsi sudah jelas. Kedua adalah kebutuhan logistik dapat diukur dengan data jumlah penduduk calon pengungsi. Ketiga energi para relawan dalam melaksanakan manajemen bencana lebih efisien. Sebab kegiatan kebencanaan sudah dimulai sejak keadaan pra bencana. Terakhir keuntungan yang diperoleh adalah, roda pemerintahan Desa Ngargomulyo tetap bisa berjalan di wilayah Desa Penyangga.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *sister village* tersebut adalah pertama kendala infrastruktur. Dalam hal ini masih minimnya fasilitas MCK yang disediakan oleh pihak Desa Tamanagung menjadi kendala utama bagi para pengungsi. Hal ini diakibatkan karena MCK

yang mampu disediakan oleh pemerintah desa Tamanagung hanya sebatas MCK yang terdapat di gedung pertemuan posko pengungsian. Kemudian kebutuhan penyediaan air bersih juga belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan pengungsi. Karena air bersih tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sanitasi tetapi juga digunakan untuk kebutuhan dapur umum.

Kendala lainnya adalah penampungan ternak yang dimiliki oleh Desa Tamanagung hanya mampu menampung maksimal 1.400 ekor ternak. Alhasil masih membutuhkan tempat penampungan ternak karena jumlah ternak yang dimiliki oleh warga Desa Ngargomulyo melebihi jumlah jiwa penduduk desa tersebut.

Kendala lainnya adalah ketika SDM BPBD Kabupaten Magelang yang mengurus *sister village* harus mengalami mutasi. Hal ini sudah terbukti ketika Drs. Joko Sudiby, MT sebagai inisiator dan pengampu *sister village* harus dimutasi untuk dipindahkan ke BAPPEDA Kabupaten Magelang. Padahal penggantinya belum menguasai betul konsep *sister village* sebagai penanggulangan bencana erupsi Merapi.

Terakhir mengenai kendala adalah kendala yang berasal dari konflik horisontal warga Desa Ngargomulyo dengan warga Desa Tamanagung. Warga pengungsi Desa Ngargomulyo merasa sebagai konsumen dan warga penyangga Desa Tamanagung merasa sebagai operator. Dari warga pengungsi yang merasa sebagai konsumen mereka minta untuk diperhatikan. Mereka juga meminta kebutuhan logistik dan penampungan yang nyaman bagi mereka. Sedangkan pihak penyangga yang merasa sebagai operator berkeinginan seluruh warga pengungsi dapat mematuhi aturan dan program yang mereka buat terkait kebencanaan *sister village*.

V. Penutup

Pelaksanaan kebijakan *sister village* mampu menjadi solusi dari kekacauan yang timbul akibat penanganan erupsi Merapi tahun 2010. Melalui *sister village* menjadi lebih terorganisir, karena warga sudah tahu harus mengungsi kemana dan bagi pemerintah desa lebih mudah

untuk menjangkau karena tujuan pengungsian sudah jelas. Materi mengenai *sister village* juga mudah dipahami karena pada dasarnya mereka sudah mengenal konsep desa paseduluran. Dimana kedua desa mengadakan kerja sama atas dasar tali persaudaraan.

Namun masih terdapat kendala dalam implementasi *sister village* terutama infrastruktur posko penampungan yang belum mampu menjangkau seluruh pengungsi. Bahkan untuk ternak juga masih dibutuhkan infrastruktur tambahan. Selain itu konflik horisontal antar warga desa pengungsi dan desa penyangga apabila tidak dikelola dengan baik justru menghabiskan energi para relawan pengungsian.

VI. Daftar Rujukan

- Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ruswandi, Dodi. *Pendekatan Klaster Dalam Tanggap Darurat Bencana di Indonesia*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.